

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

Nurrahma Tika<sup>1</sup>, M. Sayuti Enggok<sup>2</sup>, Dewi Merdayanty<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Administrasi Publik,63201,FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.NIM19120086

<sup>2</sup>Administrasi Publik,63201,FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.NIDN1122035801

<sup>3</sup>Administrasi Publik,63201,FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.NIDN1104017302

Email: nurrahmatika12345@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin Tahun 2024. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik tersebut sudah berjalan dengan Efektif sesuai dengan Indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

**Kata kunci :** *Implementasi, Sistem Informasi Partai Politik dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.*

## ABSTRACT

*This research aims to understand the Implementation of Political Party Information System (SIPOL) Policy in the Verification of Political Party Administration in the General Election Commission (KPU) of Banjarmasin City in 2024. The approach used by the author in the research uses descriptive qualitative methods by collecting interview data and documentation. The data analysis used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of the policy on the use of the Political Party Information System has been running effectively in accordance with communication indicators, resources, disposition and bureaucratic structure.*

**Keywords:** *Implementation, Political Party Information System in Verifying Political Party Administration, Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure.*

---

---

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Aasinjery. (2020). *Pengantar Teknologi Sistem Informasi*

Agustri, & Amiruddin Sijaya . (2021). *Menyongsong Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Indonesia*. Samudera Biru.

Anggito, A., & Johan Setiawan . (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv. Jejak.

Muhamad Sadi (2021). *Hukum Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.

Sigit Hermawan & Amirullah (2021). *Metode Penelitian Bisnis*. Malang: Media Nusa Kreatif.

Rukin (2019). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.

Hayat (2019). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Kharisma Putra UtamOffset.

Jurdi, F. (2020). *Penghantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: Kencana.

- Nugraha Tarmizi Achmad, & Hardi Warso. (2023). *E-Government Dalam Perspektif Pengguna*. Yogyakarta: Stilleto Book.
- Setiawan & Madhakomala (2022). *Determinan Efektivitas Kemampuan Militer*. Jawa Barat: Cv.Adanu Abimata.
- Sudrajat Abdul Hamid, & Manotar Tampubo. (2023). *Politik Hukum Pemilu*. Padang, Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi.
- Yusri & Dedi Amrizal . (2019). *Pendidikan Politik Pemerintah Kontra Golput*. . Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli. .

## **Jurnal**

- Arifuddin. (2017). *Sistem Informasi Partai Politik Dalam Perspektif Undang-Undang* .5(1\_23-35.
- Hayat (2019). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Kharisma Putra Utama Offset.
- Sahri, V. A. (2022). *Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Skripsi*.
- Male & Yonnawati (2017). *Pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Bagi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 Di Bandar Lampung*. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 171-182.
- Syafriandre Zetra & Amsari (2019). *Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019*. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 14-29.
- Sumanto & Salahuddin Nggilu. (2020). *Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundangundangan Republik Indonesia*. *Datuk Sulaiman Law Review*, 39-50.
- Wenas Wiesje Wilar, & Agustinus B. Pati. (2023). *Efektivitas Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Tomohon*. *Ilmu Sosial dan Politik*, 2337 – 5736.
- Yusri, M., & Dedi Amrizal . (2019). *Pendidikan Politik Pemerintah Kontra Golput*. . Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli. .

## **Peraturan Undang- Undang dan PKPU**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD